

PENGARUH PEMAHAMAN REGULASI, SISTEM INFORMASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP MANAJEMEN ASET PADA SKPK KOTA LANGSA

Jefry Eka Prayogi^{a*}, Iqlima Azhar^b, Muhammad Rizqi Zati^c

^{a,b,c}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

^{a*}Email : jefryeka82@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of Regulatory Understanding, Information Systems and Competency of Human Resources on Asset Management in the City Work Unit (SKPK) of Langsa City. Data analysis was performed using SPSS (Statistical Package for Social Science) version 25.0. Data collection is done through primary data and secondary data. Determination of the sample used in this study is the census method with a total sample of 60 people. The equation model analyzed is multiple linear regression and hypothesis testing. The results of the study show that (1) Understanding of Regulations, Information Systems and Human Resource Competencies simultaneously affect asset management (2) Understanding of Regulations has an effect on Asset Management (3) Information systems have no effect on Asset Management (4) Competence of Human Resources has an effect on to Asset Management.

Keywords : Regulatory Understanding, Information Systems, Human Resource Competence, Asset Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Manajemen Aset pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Kota Langsa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 25.0. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan jumlah sampel sebanyak 60 Orang. Model persamaan yang dianalisis adalah regresi linear berganda dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap manajemen aset (2) Pemahaman Regulasi berpengaruh terhadap Manajemen Aset (3) Sistem Informasi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Aset (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Manajemen Aset.

Kata kunci : Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Aset

PENDAHULUAN

Reformasi dalam bidang keuangan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dengan lahirnya undang-undang tersebut tuntutan terhadap pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dilaksanakan. Pengelolaan barang daerah merupakan bagian penting dari keuangan Negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengaturan tentang

barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam PP No.6/2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan pedoman teknis berupa Peraturan Mendagri No.17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah serta Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kota.

Kota Langsa merupakan pemekaran Kabupaten Aceh Timur, pasca pemekaran tersebut Kota langsa memiliki beberapa masalah dalam pengelolaan asetnya. Sebagaimana diungkapkan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan poin 5.1.6. aset tetap per 31 desember 2011 dan 2010 masing-masing disajikan sebesar Rp858.873.632.204,03 dan Rp761.588.486.958,03. Dari jumlah aset tetap tersebut, aset tetap yang diperoleh pada TA 2005 s.d. 2007 sebesar Rp72.532.668.923,00 tidak dapat ditelusuri nilai wajarnya. Pemerintah Kota Langsa belum memiliki kebijakan akuntansi dan pengelolaan aset tetap. Atas hal-hal tersebut BPK tidak mempunyai keyakinan yang memadai terhadap nilai aset tetap yang disajikan.

Dari pemaparan tersebut jelas sudah bahwa aset sebagai barang yang merupakan milik negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan negara, sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen aset negara juga termasuk kedalam ruang lingkup pertanggungjawaban keuangan negara melalui nilai aset yang dipandang cukup material dalam neraca pemerintah. Pemerintah daerah membutuhkan adanya manajemen aset yang baik agar dapat memantau, menghitung, dan memahami kondisi aset/barang yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Manajemen aset tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang dibeli dan berapa biayanya, aset mana yang digunakan dan bagaimana mereka dimanfaatkan, di mana ditempatkan, termasuk dalam biaya apa, tetapi juga membantu mencegah hilangnya aset tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan (regulasi). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman regulasi sangat berperan penting dalam menciptakan manajemen aset yang efektif.

Untuk menjalankan tugasnya, aparatur daerah memerlukan alat bantu dalam pekerjaannya. Sistem informasi sebagai salah satu upaya yang diperlukan untuk mengelola aset daerah dianggap penting, sesuai dengan PP No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing. Teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola aset daerah cukup dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan nilai kerugian yang sangat besar akibat kelalaian dalam pengelolaan aset daerah. Mardiasmo (2002:237) menyatakan bahwa terkait dengan peningkatan kewenangan manajemen aset negara maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, sampai pertanggungjawaban dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengurus dan penyimpan barang, dituntut untuk memiliki kapabilitas atau kompetensi yang dinilai dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pelatihan/bimbingan teknis yang pernah diikutinya yang sesuai dengan

jabatannya. Berdasarkan Undang-undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 44, disebutkan bahwa pengguna barang atau aset daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pengelolaan barang milik daerah.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mengelola aset agar dapat memberikan manfaat secara optimal dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Siregar (2004) berpendapat *Asset Management* adalah “*good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management*”. Sugiama (2013) berpendapat bahwa manajemen aset adalah suatu ilmu dan seni untuk melakukan kegiatan pengelolaan aset yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginvestasi, legal audit, menilai, mengoprasikan, memelihara, membaharui atau menghapuskan hingga mengalikah aset secara efektif dan efisien. Menurut Jim (2007) manajemen aset didefinisikan sebagai “*a continuous process-improvement strategy for improving the availability, safety, reliability and longevity of assets; that is systems, facilities, equipment and processes*”, yaitu suatu strategi proses perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan, keamanan, keandalan dan umur panjang dari aset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan dan prosesnya. Berdasarkan beberapa pengertian manajemen aset diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mengelola aset agar dapat memberikan manfaat secara optimal dengan cara yang efektif dan efisien agar aset yang dimiliki dapat memberikan nilai maksimal bagi pemiliknya.

Pemahaman Regulasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pemahaman yaitu cara, proses perbuatan memahamkan atau memahami (Poerwadarminta, 2006). Peraturan atau regulasi adalah ketentuan yang digunakan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat ataupun negara (Kurniawan, 2008:1). Pemahaman regulasi adalah proses perbuatan memahamkan ketentuan yang digunakan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat ataupun negara. Regulasi-regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah (Darise, 2009:230). Kegiatan manajemen aset pada sektor publik bergantung pada keberadaan serta kualitas kerangka pelaporan dan regulasi keuangan (Grubisic, *et al.*, 2009).

Sistem Informasi

Pada dasarnya, banyak aktivitas manusia sekarang ini yang berhubungan dengan sistem informasi, disadari atau tidak, sistem informasi telah banyak membantu manusia dan

menjadi suatu kebutuhan (Kadir, 2003:71). Dalam pengelolaan aset daerah dibutuhkan keberadaan sistem informasi. Menurut Kadir (2003:11), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Kadir, 2003:4). Di antara bermacam-macam jenis sistem informasi, salah satunya adalah *egovernment* atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Grubisic (2009) mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen aset publik sebagai bagian integral dari reformasi sektor publik. Menurut Grubisic (2009), kurangnya informasi mengenai aset publik menghalangi penentuan nilai aset.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kompetensi menurut Spencer and Spencer, (1993:9) ; *“an underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation”*. Penulis menterjemahkan, "suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu". Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005). Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang ilmu akuntansi yang berkonsentrasi pada pemerintahan dengan variabel penelitian yang terdiri dari Pemahaman Regulasi, Kompetensi SDM, dan Sistem Informasi. Lokasi penelitian ini dilakukan pada SKPK Kota Langsa. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 6 bulan, terhitung dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPK di Pemerintahan Kota Langsa. Sampel yang dijadikan responden dari masing-masing satuan kerja pada penelitian ini adalah:

1. Kasubbag umum sebagai penanggung jawab kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah yang ada didalam satuan kerjanya masing-masing.
2. Pegawai Bagian Pengurus Barang/Aset bertanggung jawab atas barang/aset yang ada didalam satuan kerjanya masing-masing.

Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan bahwa responden adalah yang berkaitan langsung dalam pengelolaan aset pada SKPK Kota Langsa. Total responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden, sehingga jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian sensus.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan tujuan agar memperoleh informasi terkait dengan variabel penelitian (Sugiyono, 2015). Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala pengukuran likert. Berdasarkan metode pengumpulan data berupa kuesioner, instrument akan disebarkan kepada 60 responden dan kemudian di jadikan lebih singkat dan jelas. Dimana setiap pertanyaan yang disusun sedemikian rupa agar dapat dijawab dalam 5 tingkatan jawaban yang diajukan.

Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis baik secara parsial maupun simultan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dan melihat pengaruh Pemahaman Regulasi (X_1), Sistem Informasi (X_2), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) terhadap Manajemen Aset (Y) pada SKPK di pemerintahan Kota Langsa yang diolah dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Spesifikasi persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2016:275) adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan :

Y	: Manajemen Aset
X_1	: Pemahaman Regulasi
X_2	: Sistem Informasi
X_3	: Kompetensi Sumber Daya Manusia
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3	: Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.358	3.498		.960	.341
1 X1	.711	.155	.443	4.590	.000
X2	.049	.193	.030	.256	.799
X3	.782	.181	.473	4.313	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Hasil tabel 1 diperoleh bersamaan sebagai berikut :

$$Y = 3,358 + 0,711 X_1 + 0,049 X_2 + 0,728 X_3$$

Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 3,358 artinya ini menunjukkan jika variabel Pemahaman Regulasi (X1), Sistem Informasi (X2), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) sama dengan nol maka nilai Manajemen Aset (Y) sebesar 3,358. Sedangkan koefisien regresi variabel Pemahaman Regulasi (X1) sebesar 0,711 artinya apabila Pemahaman Regulasi (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Manajemen Aset (Y) akan meningkat sebesar 0,711 dengan asumsi variabel Sistem Informasi (X2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) bernilai tetap. Selanjutnya, koefisien regresi variabel Sistem Informasi (X2) sebesar 0,049 artinya apabila Sistem Informasi (X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Manajemen Aset (Y) akan meningkat sebesar 0,049 dengan asumsi variabel Pemahaman Regulasi (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) bernilai tetap.

Terakhir, Koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) sebesar 0,728 artinya apabila Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka Manajemen Aset (Y) akan meningkat sebesar 0,728 dengan asumsi variabel Pemahaman Regulasi (X1) dan Sistem Informasi (X2) bernilai tetap.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Widjarjono, 2010).

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.358	3.498		.960	.341
1 X1	.711	.155	.443	4.590	.000
X2	.049	.193	.030	.256	.799
X3	.782	.181	.473	4.313	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Dari tabel 2. dapat dijelaskan bahwa:

1. Hasil nilai signifikansi variabel Pemahaman Regulasi (X1) $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa Pemahaman Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset (Y).
2. Hasil nilai signifikansi variabel Sistem Informasi (X2) $0,799 > 0,05$ maka hipotesis ditolak, yang berarti bahwa Sistem Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset (Y).
3. Hasil nilai signifikansi variabel Kompetensi Sumber daya Manusia (X3) $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa Kompetensi Sumber daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset (Y).

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Regulasi (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Manajemen Aset (Y), Sistem Informasi (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Aset (Y), dan Kompetensi Sumber Daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap Manajemen Aset (Y).

Hasil Uji F

Menurut Kuncoro (2009), uji f digunakan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas (x) secara simultan terhadap variabel terikat (y).

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	848.635	3	282.878	40.923	.000 ^b
	Residual	387.098	56	6.912		
	Total	1235.733	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Tabel 3 menjelaskan bahwa nilai F sebesar 40,923 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, artinya Pemahaman Regulasi (X1), Sistem Informasi (X2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Aset (Y) pada SKPK di Kota Langsa. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini diterima dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R² dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam regresi linear.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 ^a	.687	.670	2.629

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Berdasarkan hasil tabel 4. diketahui nilai Adjusted R square sebesar 0,670 atau sebesar 67%. Hal ini berarti variabel Pemahaman Regulasi (X1), Sistem Informasi (X2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) berkontribusi mempengaruhi Manajemen Aset (Y) sebesar 67%, sedangkan sebesar 33% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman Regulasi terhadap Manajemen Aset

Hasil dari Uji Parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Regulasi (X1) mempunyai nilai nilai t sebesar 4,590 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Regulasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset (Y). yang berarti H1 diterima. Pemahaman regulasi sangat penting bagi pengurus dan penyimpan barang karena dengan adanya pemahaman tentang peraturan (regulasi) sebelum pengurus dan penyimpan barang bekerja itu dapat meminimalisir kesalahan dalam bekerja sehingga prosedur pembagian, pelaksanaan, penggunaan dan pengurusan barang milik daerah akan semakin baik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (dalam menimbang UU No.12/2011).

Produk hukum yang bersifat menetapkan adalah berupa keputusan kepala daerah (Permendagri No.53/2011 pasal 7), contohnya Surat Keputusan (SK) Bupati/Wali Kota dalam menetapkan pengurus barang dan penyimpan barang. Bagi SKPK peraturan kepala daerah menjadi pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Abdullah, 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian Mainar *et al.*, (2017) yang mengatakan pemahaman regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset, Azhar (2017) yang mengatakan hasil penelitian terhadap variabel regulasi diperoleh nilai koefisien $\beta_2 = 1,148$, dengan nilai signifikansi (Pvalue) sebesar 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset, jadi hipotesis H_a diterima dan menolak H_0 . H_a diterima karena Pvalue $\leq 0,05$ yaitu 0,000. hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Kurniawan (2008:1) dimana regulasi atau peraturan ini merupakan suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat dan atau sebuah negara.

Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Sistem Informasi (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap Manajemen Aset (Y), hal ini ditunjukkan dari hasil uji t sebesar 0,799 yang berarti diatas 0,05 dan artinya hipotesis ditolak, dengan demikian variabel Sistem Informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset (Y) maka dari hal tersebut H_2 ditolak. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa satuan kerja di Kota Langsa yang perangkat keras dan perangkat lunaknya belum optimal. Untuk perangkat keras di beberapa satuan kerja di Kota Langsa masih terdapat komputer, printer, keyboard yang dibiarkan karena rusak sehingga dengan terjadinya hal ini penggunaan sistem informasi

menjadi tidak terlaksana dengan baik. Untuk perangkat lunak di beberapa satuan kerja di Kota Langsa masih ada yang belum menggunakan aplikasi SIMDA atau web yang berhubungan dengan pengelolaan aset/barang daerah. Winidyaningrum (2009) menyatakan kendala yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data. Implementasi sistem informasi memang tidak murah walaupun manfaat yang ditawarkan cukup banyak seperti kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, cost pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*. Apalagi jika sistem informasi yang ada belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi sistem informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Padahal dengan pemanfaatan sistem informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas manajemen aset akan tercatat lebih sistematis, mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan efektivitas manajemen aset. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen aset dan menciptakan transparansi kebijakan manajemen aset maka pemerintah kota perlu memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi yang komprehensif dan handal sebagai pendukung pengambilan keputusan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Manajemen Aset

Hasil dari Uji Parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) mempunyai nilai nilai t sebesar 4,313 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset (Y). yang berarti H3 diterima. Hal ini sesuai dengan kejadian yang dialami setiap SDM yang bekerja sebagai pengurus/ BMN yang menyatakan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki SDM sebagai Pengurus/Operator BMN maka manajemen aset pada satuan kerja juga akan semakin baik dan tertib. Hertati (2015) juga menegaskan bahwa peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki posisi yang sangat penting bagi keberlangsungan lembaga. Karena betapapun lengkap dan modernnya peralatan kerja yang dimiliki oleh lembaga tanpa ada kekuatan manusia tidak akan berfungsi untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sejalan dengan penelitian Arlini *et al.*, (2014) yang mengatakan Koefisien regresi (β) variabel kompetensi SDM diperoleh sebesar 0,246 atau $\beta \neq 0$.

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, artinya kompetensi SDM berpengaruh terhadap manajemen aset atau dengan kata lain setiap terjadi 100% perubahan dalam variabel kompetensi SDM secara relatif akan menaikkan 24,6% manajemen aset. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki SDM sebagai Pengurus/Operator BMN maka manajemen aset pada satker juga akan semakin baik dan tertib. berpengaruh terhadap manajemen aset.

Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Manajemen Aset

Dalam penelitian pada uji f dijelaskan bahwa Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Aset dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, artinya Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Aset pada SKPK di Kota Langsa.

Dengan demikian maka H4 dalam penelitian ini diterima dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ketiga variabel tersebut secara simultan dapat mempengaruhi Manajemen Aset karena dengan adanya pemahaman regulasi pekerjaan yang ada sudah diatur sehingga meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Sistem informasi berguna untuk menyimpan data-data yang dilakukan setelah pencatatan pengelolaan aset dan tidak perlu khawatir jika datanya hilang, dengan adanya sistem informasi pekerjaan akan lebih hemat waktu dan juga tenaga. Kompetensi sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pengelolaan aset sebab dengan adanya SDM sebagai Pengurus/Operator BMN maka manajemen aset pada satuan kerja juga akan semakin baik dan tertib.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemahaman regulasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset. Sedangkan Sistem Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset. Hal ini dikarenakan karena masih ada beberapa satuan kerja di Kota Langsa yang perangkat keras dan perangkat lunaknya belum optimal. Selanjutnya, Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Aset pada SKPK Kota Langsa.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan terutama variabel yang diteliti. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dalam penelitiannya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, seperti menambahkan variabel sumberdaya manusia, perilaku kepemimpinan atau lain sebagainya. Serta peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan dan memperluas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusranu. 2011. Manajemen Aset Barang Milik Daerah.
- Arlini, Mita. Darwanis, Abdullah, Syukriy. (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Di Indonesia). **Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala**. Volume 3, No. 4, 66 – 75.
- Aslan. (2014). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Tarakan). **Tesis**. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Astini, Yuli. 2018. Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. **Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis**, Vol. 13, No. 2, Juli 2018.
- Azhar, Iqlima. (2017). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi Terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. **Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)**, Vol. 1, No. 1, 49-61.
- _____. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. **Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)**, Vol. 1, No. 2, 150-160.
- _____. Darwanis. Abdullah, Syukriy. (2013). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset. (Studi Pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). **Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala**. Volume 2, No.1, 15-26.
- Hasfi, Nyemas. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang. **Jurnal Ilmiah Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura**.
- Hamidah, Rita T. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengamanan Aset Negara (Studi Empiris Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera). Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Sumatera
- Hullah, A. R., S. Pangemanan, S. Tangkumandan N. Budiarmo. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara. **Jurnal Riset Akuntansi**, Vol 3 – No 2: Halaman 9-21.
- Juliadi, Muhammad. Pituringsih, Endar. Husnan, L.H. (2017). *Determinants Test Of The Effectiveness Of Fixed Asset Management In Mataram City Government. International Conference and Call for Papers*, Jember, 2017, 572-593.
- Lase, Yenni Mulianti. 2012. Analisis Pelaksanaan Manajemen Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) dan Strategi Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. **Abstrak Tesis**. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mainar. Darwanis. Abdullah, Syukriy. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada SKPK Di Kabupaten Aceh Jaya). **Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala**. Volume 6, No. 1, 41- 50.
- Masdjojo, G.N. Dewi, R.S.K. (2018). *Local Government Asset Management: Affecting Factors and Policy Implications on Government Work Unit of Central Java Province in Indonesia. Economics World, July-Aug. 2018*, Vol. 6, No. 4, 314-324.
- Mustika, R. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Padang. **Abstrak Tesis**. Yogyakarta: Univeristas Gajah Mada.
- Mifitri, Dewi, 2009. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Langkat. **Skripsi**. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Putra, A. 2012. Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangan. **Tesis**. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No.1 Tahun 2001, Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Barang Milik Kota.
- Rosihan. Bharranti, Bonifasia Elitha. Ratang, Westim. (2017). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi Dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Pemerintah Provinsi Papua). **Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah** Vol. 2 No. 1 ISSN 2477-7838.
- Syahrini Syukri, Haliah dan Kartini, (2015) Pengaruh Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. **Tesis**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Undang-undang RI No.1 tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara.